

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata sering dipandang sebagai penghasil devisa bagi sebuah negara. Pembangunan pariwisata harus dilakukan dengan baik sehingga dapat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata yang baik tidak terlepas dari proses pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang ada dalam manajemen, pengawasan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar dan perencanaan yang telah ditentukan. Pengawasan sendiri bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan ataupun kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut. Pengawasan sendiri memiliki arti sebagai usaha yang untuk mengukur efektivitas kerja individu maupun kelompok agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Menurut Komaruddin pengawasan merupakan perbandingan antara perencanaan, pelaksanaan dan langkah-langkah perbaikan (Komaruddin, 1994 : 104). Menurut Fayol pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memeriksa apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan ruang lingkup pengawasan sendiri terdiri dari beberapa faktor antara lain sebagai berikut menemukan kesalahan dan kelemahan, memperbaiki kelemahan dan mencari solusi (A'an, 2019:260).

Pariwisata adalah sebuah kegiatan yang di mana hampir seluruh individu pernah terlibat didalamnya yang terjadi pada kurun waktu tertentu (Aniesa, 2018:3). Pariwisata merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas

yang disediakan oleh masyarakat dan pengusaha. kegiatan pariwisata disebut daerah terjadi apabila ada tujuan dan tempat wisata yang akan dikunjungi. pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia terutama dari segi sosial dan ekonomi. Menurut World Tourism Organization (WTO) pariwisata diartikan sebagai sebuah kegiatan seseorang yang berpergian ataupun tinggal di suatu daerah di luar lingkungannya yang biasanya dalam kurun waktu yang tidak lebih dari satu tahun. Menurut Gamal pariwisata adalah sebagai bentuk kepergian sementara dari individu dengan tujuan ketempat lain di luar dari tempat tinggalnya (Darwin, 2018:3). Dalam undang-undang Republik Indonesia 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pariwisata dapat berkembang apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai dan kerjasama para aktor dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan mendapatkan perhatian dari para wisatawan. Sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata. Berikut ini merupakan indikator keberhasilan dari manajemen destinasi pariwisata antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah memahami tentang manajemen destinasi pariwisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- b. Pemerintah daerah mampu merumuskan dokumen perencanaan manajemen pariwisata.

- c. Pemerintah daerah mampu mengimplementasikan dokumen perencanaan destinasi pariwisata.
- d. Terciptanya destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi yang dapat diukur dengan bertambahnya jumlah wisatawan, meningkatnya lama tinggal wisatawan, meningkatnya kepuasan wisatawan, meluasnya kesempatan kerja dan kesempatan dalam mendirikan usaha, meningkatnya kualitas lingkungan disekitar destinasi, meningkatnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi (Shofwan, 2018 : 43).

Sejak tahun 1990 pembangunan pariwisata mulai dibicarakan oleh kalangan-kalangan para ahli. Pembangunan pariwisata yang diartikan sebagai pembangunan yang mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia dimana hal itu tidak hanya menyangkut aspek fisik saja tetapi juga menyangkut aspek sosial (Hisrama,2022:244). Pembangunan pariwisata adalah sebuah pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mempertaruhkan generasi yang akan datang.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang kaya akan potensi-potensi wisata. Pemerintah Aceh telah membuat kebijakan untuk pembangunan wisata yang ada di Aceh. Adapun kebijakan tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang kepariwisataan . Aceh memiliki 23 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota. Berikut ini merupakan tabel objek wisata yang ada di Aceh antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Tempat Wisata Aceh

No	Nama Kabupaten Dan Kota	Jumlah pariwisata Aceh
1.	Aceh Barat	14
2.	Aceh Barat Daya	19
3.	Aceh Besar	141
4.	Aceh Jaya	58
5.	Aceh Selatan	119
6.	Aceh Singkil	30
7.	Aceh Tamiang	73
8.	Aceh Tengah	57
9.	Aceh Tenggara	6
10.	Aceh Timur	5
11.	Aceh Utara	22
12.	Banda Aceh	44
13.	Bener Meriah	49
14.	Bireuen	39
15.	Gayo Lues	18
16.	Langsa	8
17.	Lhokseumawe	23
18.	Nagan Raya	17
19.	Pidie	21
20.	Pidie Jaya	18
21.	Sabang	48
22.	Simeulu	39
23.	Subulussalam	9
Jumlah		877

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang sering di kunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Aceh salah satu Provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Berikut ini merupakan data wisatawan yang berkunjung ke Aceh antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data wisatawan

No		Jumlah Wisatawan Provinsi Aceh Dari Tahun 2017-2022					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wisatawan lokal	2 288	2 391	2 529	1 950 723	1 419	1 710
2.	Wisatawan mancanegara	75 758	106 281	107	29 199	1 748	5 752

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2022

Dilihat dari data di atas jumlah wisatawan yang mengunjungi Aceh sempat menurun pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dikarenakan terjadi pandemi covid 19. Aceh memiliki 23 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota. Salah satu kabupaten yang kaya akan destinasi wisata adalah Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk mengelola pembangunan wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah membuat regulasi tentang pembangunan kepariwisataan. Adapun Qanun tersebut adalah Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2025 pada pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pembangunan pariwisata Aceh Tengah meliputi :

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
- c. Pembangunan Industri Pariwisata
- d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh yang sering di juluki dengan kota di atas awan. Aceh Tengah merupakan daerah yang didominasi oleh suku gayo yang memiliki ciri khas adat yang berbeda dari suku-suku yang ada di Aceh. Aceh Tengah adalah salah satu daerah yang ada di Aceh yang kaya akan potensi wisata. Dengan letaknya yang strategis membuat membuat Aceh Tengah banyak dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data wisatawan

No		Jumlah Wisatawan Kabupaten Aceh Tengah Dari Tahun 2017-2022					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wisatawan lokal	38 622	71 762	52 946	20 790	250 595	309 610
2.	Wisatawan mancanegara	682	931	424	336	28	57

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tengah Tahun 2022

Jumlah wisatawan lokal di Aceh Tengah sempat menurun pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid 19 dan untuk jumlah wisatawan mancanegara turun pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Aceh Tengah yang perlahan mulai naik. Dengan potensi pariwisata yang besar dan juga kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara memberi dampak yang positif bagi perkembangan pariwisata di kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah mempunyai 57 destinasi pariwisata. Berikut ini data destinasi wisata Aceh Tengah antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.4
Destinasi Wisata Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Destinasi Wisata Kabupaten Aceh Tengah Dari Tahun 2017-2022					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Atu lintang	1	1	1	1	1	-
2.	Bebesen	1	1	1	1	3	2
3.	Bies	1	1	1	1	1	-
4.	Bintang	10	10	10	11	10	7
5.	Celala	-	-	-	-	-	-
6.	Jagong jeget	2	2	2	2	2	-
7.	Kebayakan	4	4	4	4	10	2
8.	Ketol	1	1	1	1	1	-
9.	Kute panang	-	-	-	-	-	-
10.	Linge	6	6	6	6	6	2
11.	Lot tawar	10	10	10	11	14	3
12.	Pegasing	4	4	4	4	5	2
13.	Rusip antara	-	-	-	-	-	-
14.	Silih nara	-	-	-	-	4	-
Jumlah		40	40	40	42	57	19

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tengah Tahun 2022

Berikut ini merupakan destinasi wisata di Kabupaten Aceh Tengah yang tidak berfungsi antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.5
Wisata Yang Tidak Berfungsi

No	Wisata Yang Tidak Berfungsi	Alamat
1.	Agro Wisata Star Kopi Batu Lintang	Kp. Merah Mege Kec. Batu Lintang
2.	Air Terjun Mengaya	Kp. Mengaya Kec. Bintang
3.	Air Terjun Sumung	Kp. Uning Kec. Linge
4.	Dermaga Toweren Toa	Kp. Toweren Kec. Lot Tawar
5.	Gayo Water Park	Kp. Pegasing Kec. Pegasing
6.	Lut Kucak Gegarang	Kec. Jagong Jeget
7.	Pante Lung Toweren	Kp. Toweren Kec. Lot Tawar
8.	Pesanggaan Singah Mata	Kp. Bukit Sama Kec. Kebayakan
9.	PLTA Silih Nara	Kec. Silih Nara
10.	Totor Simpil Penarun	Kec. Linge
11.	Water Park Pedemun	Kp. Pedemun Kec. Lottawar
12.	Water Park Pegasing	Pegasing Kec. Pegasing
13.	Wih Porak Bius	Pegasing Kec. Pegasing
14.	Kampung Kopi Tebes Lues	Kecamatan Bies

15.	Goa Loyang Datu	Kec.Linge
-----	-----------------	-----------

Sumber : Observasi Awal Peneliti Tahun 2022

Menurut observasi awal yang peneliti lakukan terdapat 13 tempat wisata yang tidak lagi beroperasi seperti biasa. Tempat wisata ini ada tetapi tidak lagi dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengelolaan pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata di kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah merencanakan pengembangan kepariwisataan sejak tahun 2018. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah terfokus kepada 7 poin antara lain sebagai berikut :

- a. Danau Laut Tawar dan sekitarnya
- b. Kota Takengon dan sekitarnya
- c. Agrowisata Pantan Terong, Kampung Kopi Tebes Lues dan sekitarnya.
- d. Wisata Air Panas Weh Pesam dan sekitarnya
- e. Air Terjun Bur Bulet dan sekitarnya
- f. Goa Loyang Datu, Atu Belah, Sejarah Kerajaan Linge dan sekitarnya
- g. Air Terjun Mengaya dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan terdapat 6 tempat wisata yang kurang dalam perkembangan antara lain sebagai berikut :

- a. Air terjun mengaya
- b. Kampung Kopi Tebes Lues.
- c. Goa Loyang Datu.
- d. Atu Belah.

Berikut ini beberapa contoh tempat wisata yang ada di Aceh Tengah kurang dalam pengawasan dan pengelolaan antara lain sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Gambar 1</p>  <p style="text-align: center;">Kampung Kopi Tebes Lues</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 2</p>  <p style="text-align: center;">Goa Loyang Datu</p>
<p style="text-align: center;">Gambar 3</p>  <p style="text-align: center;">Jalan Menuju Goa Loyang Datu dan Atu Belah</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 4</p>  <p style="text-align: center;">Air Terjun Mengaya</p>

Gambar 1.1 lokasi yang terpilih

Gambar 1 merupakan tempat wisata kampung kopi tebes lues dimana tempat ini tidak lagi berfungsi sejak tahun 2020 dan tidak lagi dikunjungi oleh wisatawan. Gambar 2 merupakan gambaran lokasi Goa Loyang Datu yang beralamat di Kampung robel Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tempat ini masih kurang layak untuk kunjungan wisatawan karena kebersihan tempat wisata ini masih kurang karena masih terdapat sampah daun kering yang

beserakan disekitar lokasi masuk kedalam Goa Loyang Datu dan juga jarak yang terlalu jauh dari pusat kota. Gambar 3 merupakan jalan menuju tempat wisata Goa Loyang Datu dan Atu Belah yang jauh dari pusat kota dan sering terjadi bencana alam. Hal ini menyebabkan sulitnya wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Gambar di atas terjadi pada akhir januari tahun 2023. Gambar 4 merupakan lokasi wisata air terjun mengaya dimana lokasi wisata ini tidak lagi berfungsi seperti biasa. Pemungutan biaya parkir kendaraan dan biaya masuk di lokasi wisata setiap tempat wisata berbeda-beda. Pemungutan ini ditentukan oleh pemilik tempat wisata. Pemungutan biaya parkir kendaraan roda dua sekitar Rp 5000- Rp 10.000 dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp 20.000- Rp 50.000. oleh sebab itu pariwisata Kabupaten Aceh Tengah perlu mendapatkan perhatian khusus untuk pengawasan pariwisata. Pariwisata kabupaten Aceh Tengah tidak hanya bernilai historis tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengawasan Kepariwisata Di Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pengawasan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah dilihat dari perspektif Stoner dalam Mauliana 2020 adalah menetapkan standar, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja dan mengambil tindakan korektif.
2. hambatan yang dihadapi dinas pariwisata dalam pengawasan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan konsep proses pengawasan yang terdiri dari menetapkan standar dan metode pengukuran, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan korektif.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam mengawasi kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memperkaya teori tentang kebijakan publik khususnya tentang pengawasan kepariwisataan.

- b. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti untuk menambah ilmu Tentang Pengawasan Kepariwisata.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti.
- b. Peneliti juga berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi kepariwisataan di kabupaten aceh tengah dan masyarakat sekitar lokasi wisata dapat bekerjasama dalam proses pengawasan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah.